

BAB V

5.1 Kesimpulan

Modern Slavery atau bentuk perbudakan yang terjadi di saat sekarang ini. Perbudakan semestinya sudah terhapuskan sejak dulu, namun praktiknya masih terjadi hingga saat ini. Berdasarkan data Global Slavery Index di tahun 2018, diperkirakan ada 90.000 budak jiwa di Mauritania. Mauritania adalah negara yang terakhir kali mengilegalkan perbudakan yaitu di tahun 1980. Mauritania aktif dalam mengupayakan penghapusan perbudakan.

Di aturan domestik, Mauritania telah merombak kebijakannya sebanyak tiga kali, terakhir kali di lakukan adalah pada tahun 2015. Mauritania juga membentuk agensi yang memang bertujuan untuk pemberantasan kemiskinan dan perbudakan, Tadamoun. Di dunia Internasional, Mauritania juga ikut meratifikasi berbagai perjanjian dan konvensi, seperti Supplementary Slavery Convention dan juga berbagai perjanjian mengenai perbudakan di Kawasan Afrika. Mauritania juga berpartisipasi sebagai anggota dari International Labour Organization.

Bentuk perbudakan di Mauritania adalah seperti praktik perbudakan, *slavery-related practiced, early and forced marriage, child exploitation* dan perdagangan manusia. Masih berjalannya praktik perbudakan di Mauritania disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor agama dan karena kurangnya akses terhadap fasilitas umum.

Sepanjang tahun 2017 dan 2018, Mauritania menolak aktivis anti-perbudakan masuk ke negaranya. Seperti aktivis anti-perbudakan dari Abolition Institute dan Amnesty Internasional. Selain itu Mauritania juga mengusir fotografer jurnalis dan peneliti yang meneliti perbudakan di negaranya. Mauritania juga bertindak keras terhadap aktivis anti-perbudakan di negaranya, negara ini menangkap seorang aktivis anti-perbudakan di tahun 2016, yaitu Biram Dah Abeid.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti menemukan beberapa jawaban yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Jawaban pertama, pemerintahan Mauritania yang didominasi oleh etnis *Beydan* ingin mempertahankan status quo, mereka menduduki strata sosial tertinggi di Mauritania, maka dari itu mereka menolak aktivis yang masuk, karena hal tersebut dapat membahayakan posisi mereka. Jawaban kedua adalah karena Mauritania merasa pihak aktivis adalah orang lain atau *other*, sehingga mereka merasa lebih tau, lebih superior, sehingga menolak masuknya para aktivis.

5.2 Saran

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti melihat bagaimana respon internasional mengenai penghapusan perbudakan di Mauritania dan upaya Mauritania dalam pemberantasan perbudakan, namun Mauritania sendiri belum melakukan hal tersebut dengan baik. Masuknya aktivis anti-perbudakan dapat membantu Mauritania menyelesaikan permasalahannya, namun Mauritania menolak masuknya aktivis. Peneliti menyarankan agar pemerintah Mauritania lebih serius dalam penghapusan perbudakan, bukan hanya menyelamatkan status satu kelompok.

